

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Masters dan Katherine Hall. *Corruption in a Global Context Restoring Public Trust, Integrity, and Accountability*. Ed. Melchior Powell. Dina Wafa. dan Tim A. Abingdon dan New York. Routledge. 2020
- Andi Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Ed. 3. Cet. 5. Jakarta. Sinar Grafika. 2022
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Cet. 13. Jakarta. Rajawali Pers. 2019
- Brigita Manohara. *Dagang Pengaruh (Trading In Influenca) di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2017
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010
- Chaerudin Dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Refika Aditama. 2009
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2020
- Edita Elda. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok. Rajawali Pers. 2021
- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Gandjar Laksamana Bondan. *Buku Informasi Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. KPK. 2022
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006
- Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku pada Tindak pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta. Alungadan Mandiri. 2020

Peter de Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010. Terjemahan dari peter de Cruz. *Comparative Law in Changing World*. London-Sydney. Cavendish Publishing Limited. 1999

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers. 2015

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta. 2010

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta. Sinar Grafika. 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal**

Ahmad Fahd Budi Suryanto. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1. No. 2. 2021

- Alexzander Rinaldy dan Dian Andriawan Daeng Tawang. Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak Pidana Suap. *Jurnal hukum Adigama*. 2018
- Andreas Nathaniel Marbun. Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?. *Integritas*. Vol. 3. No. 1. 2017
- Bondan Wicaksono Dkk. Penaggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 2. No. 2. 2021
- Dian Andriawan Daeng Tawang. Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal Trisakti*. 2020
- Eddy O.S. Hiariej. Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49. No. 4. 2020
- Edita Elda. Arahan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komsisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata. Journal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2019
- Faisal Santiago. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1. No. 1. 2017
- Gazali Rahma dan Sahlan Tomayahu. Penegakan Hukum di Indonesia. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amal Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 4. No. 1. 2020
- Gregory. Robert. Assessing 'Good Governance' and Corruption in New Zealand: 'Scientific' Measurement, Political Discourse, and Historical Narrative. New Zealand. School of Government, Victoria University of Wellington. *Institute for Governance and Policy Studies Working Paper*. No. 13/03. 2013
- Husni Thamrin. Law Enforcement in Indonesia in The Perspective of Law States. *Awang Long Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2020
- I Gusti Ayu Werdhiyani. I Ketut Rai Setiabudhi. Policy Formulation Against Bribery in The Private Sector in Indonesia Criminal Law Reform. *Sibatik Journal*. Vol. 2. No. 3. 2023
- Indra Kurniawan Dkk. Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Legalitas. Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 1. 2022
- Jon S.T. Quah. Leadership and Culture in Combating Corruption: A Comparative Analysis. *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*. Vol. 25. No. 2. 2022



Moh. Nufaizi Golonggom. Berlian Manopo dan Attie Olli. Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen*. Vol. X. No. 5. 2021

Nani Mulyati. Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Nagari Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2019

Nani Mulyati. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Sektor Privat di Negara ASEAN. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7. No. 2. 2023

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Upaya Pencegahan Korupsi. *Stranas PK*

### Artikel dan Dokumen Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. 2023

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report*. 2019

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report*. 2020

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report*. 2021

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report*. 2022

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report*. 2023

Serious Fraud Office. *Statement of Intent 2023-2027*. 2023

United Nations Office on Drugs and Crime. *Country Review Report on New Zealand*. 2020

### Putusan Perkara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

### Internet

Apa Itu Tindak Pidana Suap. PDAI Universitas Medan Area. 2022. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

Azhar Ramadhan. *PT Merial Esa Tersangka Korporasi Kasus Suap di Bakamala Segera Diadili*. <https://news.detik.com/berita/d-5904075/pt-merial-esa-tersangka-korporasi-kasus-suap-di-bakamla-segera-diadili#:~:text=KPK%20melimpahkan%20berkas%20perkara%20tersangka>

[%20korporasi%20PT,Merial%20Esa%20akan%20segera%20diadili%20di%20kasus](#)

Carl Walronf. *Dishonesty Crime*. 2011. <https://teara.govt.nz/en/dishonesty-crime/page-4>

Chapman Tripp. *Bribery and Corruption Risks and Strategies for New Zealand Businesses Operating Overseas*. <https://www.businessnz.org.nz/wp-content/uploads/2022/07/Bribery-and-Corruption-Risks-and-Strategies-for-NZ-Businesses-Operating-Overseas.pdf>. 2022

DLA Piper. *New Zealand-Global Bribery Offenses Guide*. 2022. <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2019/09/global-bribery-offenses-guide/new-zealand>

Frans Hendra Winarta. *Korupsi di Sektor Swasta yang Terlupakan*. 2023. <https://www.franswinarta.com/news/korupsi-di-sektor-swasta-yang-terlupakan/>

Global Risk Profile. *Global Corruption Index*. 2023. <https://risk-indexes.com/global-corruption-index/>

Governance, Risk Management, and Compliance Indonesia. *Menumpas Korupsi: Penanganan Kasus Penyuapan dan Penegakan Hukum*. 2024. [1 new message \(grc-indonesia.com\)](https://www.grc-indonesia.com)

Hamish McNeilly. *Former Livestock Agent Sentenced for Defrauding Company Over \$1.3M*. 2021. <https://www.stuff.co.nz/national/crime/127174883/former-livestock-agent-sentenced-for-defrauding-company-of-over-13m>

Hery Supandi. *KPK Ungkap Biang Kerok Pelaku Usaha Rawan Terlibat Kasus Korupsi*. 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6902860/kpk-ungkap-biang-kerok-pelaku-usaha-rawan-terlibat-kasus-korupsi>

Hukumonline. *Perbedaan Perlindungan dan Penegakan Hukum*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-danpenegakan-hukum-lt6230577e1a784?page=2>

Hukumonline. *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalampenegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

Indonesia Corruption Watch. *Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 2-6 November 2015*. 2015. <https://antikorupsi.org/id/article/bulletin-mingguan-anti-korupsi-2-6-november-2015>

Indonesia Corruption Watch. *Korupsi di Sektor Swasta*. 2011. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-sektor-swasta-0>

Indra Gunawan. *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi>

Jake Kenny. *Corrupt Council Assets Manager Took Cash Bribes in Exchange for \$500,000 Worth of Contracts, Jury Finds.* 2022. <https://www.stuff.co.nz/national/crime/130764507/corrupt-council-assetsmanager-took-cash-bribes-in-exchange-for-500000-worth-of-contracts-juryfinds>

Jumarto Yulianus. *Korupsi di Dunia Usaha Masih Dominan dan Rawan Terus Terjadi.* <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/13/korupsi-didunia-usaha-masih-dominan>

Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2204-mengenal-lebih-dekat-hoge-raad-belanda>

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan.* <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Konsil Kedokteran Indonesia. *Profil Konsil Kedokteran Indonesia.* <https://kki.go.id/page/read/profil-konsil-kedokteran-indonesia>

Mohar Syarif. *KPK RI Catat 417 Pelaku Korupsi dari Sektor Usaha.* [KPK RI Catat 417 Pelaku Korupsi dari Sektor Usaha | Neraca.co.id](https://www.neraca.co.id/kpk-ri-catat-417-pelaku-korupsi-dari-sektor-usaha)

Pan Mohammad Faiz. *Klasifikasi dan Nilai dari Perbandingan Hukum.* <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/03/perbandingan-hukum-2/#:~:text=Perbandingan%20makro%2C%20yaitu%20perbandingan%20dengan,diterapkan%20di%20Perancis%20dan%20Jerman>

Perdana Putra dan Teuku Muhammad Valdy Arief. *Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sumbar, 2 Tersangka Ditahan.* <https://regional.kompas.com/read/2022/09/06/113335778/dugaan-korupsi-pembangunan-masjid-raya-sumbar-2-tersangka-ditahan>

Pusat Edukasi Antikorupsi. *Memelihara Integritas di Lingkup Korporasi Swasta,* 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230815-memeliharaintegritas-di-lingkup-korporasi-swasta>

Rene David, *Comparative Law,* <https://www.britannica.com/science/comparativelaw>



- Rezkianna Nisaputra. *Peran Penting Sektor Swasta dalam Berantas Korupsi di Indonesia*. 2022. <https://infobanknews.com/peran-penting-sektor-swastadalam-berantas-korupsi-di-indonesia/>
- Serious Fraud Office. *Defendant in Auckland Council Bribery Case Gets Home Detention*. 2020. <https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/defendant-in-auckland-council-bribery-case-gets-home-detention>
- Serious Fraud Office. *Insolvency Practitioners Key to Fighting Corporate Fraud*. 2011. <https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/insolvency-practitioners-key-to-fighting-corporate-fraud/>
- Serious Fraud Office. *Private Sector Fraud and Corruption*. <https://sfo.govt.nz/fraud-and-corruption/what-we-do/private-sector-fraud-and-corruption/>
- Siaran Pers. *KPK Tangkap Tangan Suap Proyek di Labuhan Batu*. 2024. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3350-kpk-tangkap-tangan-suap-proyek-di-labuhan-batu>
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang. [https://sipp.pn-padang.go.id/detil\\_perkara](https://sipp.pn-padang.go.id/detil_perkara)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang. *Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi*. [https://sipp.pn-padang.go.id/list\\_perkara/page/1/KzJHazc0VFJzeXJsaFZnRklVT2ZQY0xMVi9UaU9QdFZwOU5WU3NBR1hEMnM3b3hFaDNMYmZ2cmVySmlUcmI3b1hLYjZmQ1VPWTJjOWJoZVYxVFJXTUE9PQ==/key/col/2](https://sipp.pn-padang.go.id/list_perkara/page/1/KzJHazc0VFJzeXJsaFZnRklVT2ZQY0xMVi9UaU9QdFZwOU5WU3NBR1hEMnM3b3hFaDNMYmZ2cmVySmlUcmI3b1hLYjZmQ1VPWTJjOWJoZVYxVFJXTUE9PQ==/key/col/2)
- Suap Sepakbola Indonesia Terjadi Sejak Era 80-an*. <https://www.jpnn.com/news/suap-sepakbola-indonesia-terjadi-sejak-era-80-an>
- Transparency International Indonesia. 2022. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi 2023. Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol*. 2023. [CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia](https://www.transparency.org/en/corruption-perceptions-index-2023)
- Transparency International New Zealand. *Auckland Business Anti-Corruption Forum*. 2024. [Auckland Business Anti-Corruption Forum \(transparency.org.nz\)](https://www.transparency.org.nz)
- United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention Against Corruption*. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>

## Kamus

*Black's Law Dictionary*. Ed. 8. 2

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>

Meriam Webster. 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/law%20enforcement>

## Konvensi Internasional

*Secret Commission Act*. 1910

*Crimes Act*. 1961

*United Nations Convention Against Corruption*. 2003

*Organized Crime and Anti-corruption Legislation Bill*. Peraturan Pemerintah Selandia Baru. 2014

